

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Diplomasi Yang Digunakan Pemerintah Indonesia Dalam Menyelamatkan 10 WNI Yang Disandera Abu Sayyaf

Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam membebaskan sandera 10 WNI dari tangan Abu Sayyaf tidak terlepas dari diplomasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia membentuk sebuah tim diplomasi untuk membebaskan sandera 10 WNI. Diplomasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada diplomasi *Government to Government (G to G)* tetapi juga melibatkan jaringan-jaringan nonformal dan seluruh lembaga yang memberikan perhatian khusus terhadap penyanderaan ini. Praktek yang digunakan pemerintah adalah implementasi dari beberapa bentuk diplomasi dan penggunaan diplomasi secara total. Bentuk diplomasi yang digunakan oleh pemerintah dalam pembebasan sandera 10 WNI dari tangan Abu Sayyaf adalah sebagai berikut:

- *Diplomasi Komersial*, adalah diplomasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam suatu masalah. Diplomasi ini dilakukan oleh pihak perusahaan PT Patria Maritime Lines dengan kelompok Abu Sayyaf.
- *Peran Militer*, dalam opsi pembebasan 10 Sandera WNI, TNI berfungsi sebagai pengawasan terhadap keamanan negosiator atau para diplomat yang melakukan perundingan terhadap pemerintah Filipina maupun terhadap pihak penyandera Abu Sayyaf.
- *Peran warga sipil*, warga sipil sangat berperan atas kebebasan sandera 10 WNI dari Abu Sayyaf. Keterlibatan warga sipil dalam tim negosiator menjadi kunci

utama keberhasilan diplomasi total. Yang termasuk dalam tim negosiator pembebasan sandera 10 WNI dari warga sipil adalah Umar Patek, Kivlan Zen dan Nur Missuari. Kivlan Zen yang menjadi perwakilan pemerintah sebagai negosiator pergi ke Filipina. Berdasarkan data yang diperoleh dari Umar Patek bahwa militan Abu Sayyaf yang membajak kedua kapal Indonesia adalah Al-Habsi Misaya, sehingga Kivlan Zen sebagai negosiator meminta bantuan kepada kepala MNLF Nur Missuari untuk membantu membebaskan sandera 10 WNI dari Abu Sayyaf, karena sebelumnya Kivlan Zen Al-Habsi Misaya pernah bertemu dengan militan Abu Sayyaf sebagai pengawal dan supir pribadi Nur Missuari. Berdasarkan hal itu Kivlan Zen melakukan pendekatan dengan Nur Missuari. Setelah Kivlan Zen melakukan diplomasi dengan Nur Missuari secara diam-diam, pada tanggal 01 akhirnya sandera 10 WNI anak buah kapal dibebaskan.

2. Kendala Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Menyelamatkan 10 WNI Yang Disandera Abu Sayyaf

Proses pembebasan sandera 10 WNI sampai dengan dibebaskannya para sandera berlangsung cukup lama. Lamanya proses pembebasan sandera disebabkan karena adanya kendala para negosiator untuk melakukan negosiasi. Kendala yang dihadapi saat membebaskan sandera 10 WNI adalah sebagai berikut:

1. Pihak intelijen Indonesia maupun Filipina sulit untuk melacak posisi para penyandera. Posisi penyandera sulit untuk dilacak karena kelompok Abu Sayyaf melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Mindanao Filipina Selatan.

2. Negosiator sulit mendapatkan akses komunikasi untuk melakukan negosiasi dengan Abu Sayyaf, dan
3. Wilayah Filipina Selatan yang termasuk Jolo, Basilan, Mindanao belum sepenuhnya di kuasai oleh otoritas Filipina (Saputra, 2016).

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Dalam proses masalah internasional para diplomat harus mengedepankan cara damai, karena cara damai lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Seperti pemerintah Indonesia yang berhasil membebaskan sandera 10 WNI Anak Buah Kapal Brahma 12 dan Tongkang Anand. Keberhasilan diplomasi total dalam pembebasan WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf memperlihatkan tekad pemerintah untuk lebih mengedepankan pendekatan damai daripada militer. Diplomasi total semacam ini memerlukan keterlibatan semua pihak, baik formal maupun nonformal sehingga memperlihatkan keberagaman komponen bangsa untuk terlibat dalam penyelesaian krisis penyanderaan tersebut. Penyelesaian secara damai ini akan meningkatkan citra Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai yang sangat menekankan sisi diplomasi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Meskipun melibatkan banyak komponen bangsa, namun diplomasi total tetap harus menempatkan Kementerian Luar Negeri pada posisi yang terdepan karena merekalah yang paling

bertanggung jawab terhadap keselamatan WNI yang berada di luar negeri.

2. Kepada Pemerintah Indonesia supaya lebih cepat dan tanggap dalam menangani masalah seperti penyanderaan 10 WNI ini. Untuk menghindari hal ini terjadi lagi pemerintah harus segera membuat penjagaan di wilayah yang rawan pembajakan. Pemerintah juga harus membuat pengawalan ketat khususnya di perbatasan wilayah Indonesia.
3. Kepada masyarakat Indonesia khususnya daerah-daerah perbatasan yang rawan pembajakan agar lebih waspada. Khususnya bagi nelayan atau pekerja di laut segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila melihat sesuatu yang mencurigakan.